

# PERANAN IDEOLOGI DALAM INTEGRASI NASIONAL

Afriadi S. Hasibuan<sup>1</sup>, Djoko Sulistyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

afriadish@gmail.com

<sup>2</sup>) Badan Penelitian dan Pengembangan -Kementerian Dalam Negeri

## ABSTRACT

*The relationship between ideology and nation integration is interrelated. The linkage according to the existence of the ideology, it is indeed intended to collect, to unite and to mobilize the people politically and ideologically. Therefore, it has been integrated under the protection of the nation ideology called Pancasila. In this context, Pancasila had been prepared as an ideology of unity by the nation's founders. Pancasila has functions as a common reference in solving differences and political conflicts between groups and the existing political forces. Pancasila ideology plays a role in nation integration as a unifier, which can be understood through the efforts of various ideological socialization fields. This hope will be able to comprehend the meaning contained in the nation ideology, the five aspects of Pancasila. Furthermore, this understanding will be able to be implemented and be realized in various fields of real life. This is followed up by giving an opportunity to develop new thoughts that are relevant and meets the reality time by time to make the ideology of Pancasila actual.*

**Keywords:** ideology, nation integration

## ABSTRAK

Hubungan antara Ideologi dan Integrasi Nasional saling berkaitan. Keterkaitan didasarkan pada eksistensi ideologi tersebut memang dimaksudkan untuk mengumpulkan, mempersatukan dan menggerakkan masyarakat secara politis maupun ideologis, dengan demikian, telah terintegrasi di bawah perlindungan ideologi nasional yakni Pancasila. Dalam konteks inilah Pancasila oleh para pendiri bangsa dipersiapkan sebagai ideologi persatuan. Pancasila berfungsi juga sebagai acuan bersama dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Ideologi Pancasila berperan dalam integrasi nasional sebagai pemersatu, yang dapat dipahami melalui upaya berbagai sosialisasi bidang ideologi. Harapan tersebut akan mampu memahami makna yang terkandung di dalam ideologi nasional yakni lima sila Pancasila. Selanjutnya, pemahaman tersebut akan dapat dilaksanakan dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan secara nyata. Hal ini ditindaklanjuti dengan memberi peluang untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan kenyataan dari masa ke masa sehingga membuat ideologi Pancasila selalu aktual.

**Kata kunci:** ideologi, integrasi nasional

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara pluralistik yang terdiri atas beragam suku, bahasa, adat-istiadat, golongan dan agama. Negara sebagai organisasi yang mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat dan juga untuk maksud mempererat hubungan-hubungan antar suku, sosial dan budaya dalam masyarakat di dalam organisasi negara. Negara menjadi dasar acuan bagi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berkelompok yang disatukan dalam suatu kehidupan bernegara. Oleh karena itu, semangat persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dan dipelihara agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh. Bila semangat persatuan dan kesatuan itu tidak utuh maka negara kita tercinta inipun akan dapat mengalami gangguan tidak menjadi satu keutuhan yang kokoh.

Mengingat kembali bahwa, dengan peristiwa runtuhnya negara Uni Soviet dan negara-negara di Eropa Timur menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Negara-negara tersebut runtuh dengan konsekuensi berdiri negara negara kecil. Setiap suku dan golongan memisahkan diri dan membentuk negara masing-masing. Keadaan seperti inipun hampir terjadi di negara kita, yaitu pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950-an. Dalam periode ini, banyak gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Namun, berkat pendekatan dan kemauan politik dari para elit republik, gerakan separatis dapat diatasi dan diyakinkan masuk kembali ke dalam NKRI.

Pada saat ini, dengan adanya perpecahan negara Uni Soviet dan kemudian diikuti negara-negara Eropa Timur, diperlukan kewaspadaan sehingga kejadian yang dialami negara lain itu tidak terjadi di Indonesia. Dalam hubungan tersebut, maka faktor-faktor yang dapat mempersatukan bangsa perlu dipertahankan. pada umumnya, diketahui bahwa di antara faktor-faktor pemersatu bangsa adalah: **kepercayaan** seperti keyakinan agama, dan **sikap** serta **nilai-nilai** seperti bahasa, suku/ras, dan **ideologi**. Dari faktor-faktor tersebut, tulisan ini mencoba ingin membahas peranan ideologi Pancasila dalam integrasi nasional.

Berbicara tentang ideologi akan senantiasa menghadapi kompleksitas permasalahan yang terus berkembang. Hal ini mengingat masalah ideologi sudah muncul dan banyak dibicarakan sejak abad 18, yang ditandai dengan lahirnya gerakan *Renaissance*. Sampai akhir abad ke-20 ini dan memasuki abad ke-21, masalah ideologi tetap mewarnai setiap segi kehidupan dan percaturan politik dunia. Oleh karena itu, berbagai pakar akan dapat mengemukakan berbagai macam pengertian tentang ideologi seperti John Levi Martin (2015: 11) menyampaikan bahwa. *“political and social analysts define ideology, they tend to give extremely broad definitions, usually including beliefs, attitudes and values”*. Dengan demikian, ada banyak batasan dan pengertian ideologi yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa pengertian atau batasan ideologi. Nicki Lisa Cole (2017: 1) dan Sparknotes (2017) dalam *Political Ideology and Style* mengemukakan bahwa:

*Ideology is the lens through which a person sees the world. Within sociology, ideology is broadly understood as referring to the worldview a person has that is the sum total of their culture, values, beliefs, assumptions, common sense, and expectations for themselves and of others. Ideology gives an identity within society, within groups, and in relation to other people. It shapes our thoughts, actions, interactions, and what happens in our lives and in society at large.*

Dengan demikian, Nicki Lisa Cole (2017: 1) mengatakan ideologi dapat didefinisikan berikut:

*Ideology can be defined as the lens through which one sees the world, through which one understands their own position in the world, their relationship with others, as well as their individual purpose, role, and path in life. Ideology is also understood to perform the function of framing how one sees the world and interprets events and experiences, in the sense that a frame captures and centers certain things and excludes others from view and consideration.*

Ideologi sebagai suatu lensa melihat kenyataan di lingkungan masyarakat dalam politik. Selanjutnya, Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu yang secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi.

Menurut Alfian (1990), suatu ideologi kalau tidak ingin ditinggalkan oleh para pengikutnya harus memiliki dimensi realitas, dimensi idealisme dan dimensi fleksibilitas (pengembangan). Dari segi dimensi realitas, suatu ideologi itu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang riil yang hidup dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi tersebut lahir. Hal ini dirasakan oleh mereka dan dihayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begitu, nilai-nilai dasar itu tertanam dan berakar dalam masyarakatnya.

Dari segi dimensi idealisme, suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui idealisme atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dihayati suatu masyarakat atau bangsa mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama mereka. Idealisme atau cita-cita tersebut seyogianya berisi harapan-harapan yang masuk akal, bukanlah lambungan angan-angan yang sama sekali tidak mungkin direalisasikan. Oleh karena itu, dalam ideologi yang tangguh biasanya terjalin pertautan yang saling memperkuat antara dimensi realitas dan dimensi idealisme yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, ideologi tersebut akan berhasil menjadikan dirinya sebagai landasan atau dasar (melalui dimensi realitas) dalam membangun berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dimensi fleksibilitas mencerminkan kemampuan suatu ideologi dalam memengaruhi dan sekaligus menyesuaikan

aikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Memengaruhi berarti ikut mewarnai proses perkembangan itu sendiri. Sedangkan, menyesuaikan diri berarti bahwa masyarakat berhasil menemukan interpretasi-interpretasi baru terhadap nilai-nilai dasar atau pokok dari ideologi itu sesuai dengan realita-realita baru yang muncul dan yang mereka hadapi dalam kenyataan. Dengan demikian, nilai-nilai dasar itu, seperti kesatuan dan persatuan, nasionalisme dan keadilan sosial, akan tampak selalu relevan sebagai idealisme yang wajar. Berdasarkan pemikiran tersebut agar tetap relevan ideologi itu dan tampaknya perlu mempunyai fleksibilitas agar dapat melahirkan interpretasi-interpretasi baru tentang dirinya sesuai dengan perkembangan zaman dan terutama dalam perkembangan era global sekarang. Sebagaimana dapat dilihat begitu banyak tantangan-tantangan di era global, dengan adanya fleksibilitas di dalam suatu ideologi membuka jalan bagi generasi-generasi baru masyarakat untuk mengembangkan dan memakai kemampuan intelektual mereka guna mencari atau meneliti interpretasi-interpretasi baru yang mungkin bisa diberikan terhadap nilai-nilai dasar ideologi itu. Melalui interpretasi-interpretasi baru, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam suatu ideologi akan berhasil memengaruhi relevansi dirinya di dalam perubahan masyarakat.

#### MAKNA INTEGRASI NASIONAL

Konsep persatuan bangsa atau kesatuan bangsa secara umum di dalam ilmu politik diistilahkan sebagai integrasi nasional. Istilah integrasi nasional merujuk pada

integrasi atau keterpaduan di dalam segala aspek kehidupan bangsa, yang secara umum meliputi sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dengan demikian, integrasi biasanya menunjuk suatu proses untuk penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara sosial, budaya, maupun politik ke dalam satu kesatuan wilayah untuk membangun kesetiaan yang lebih besar dan bersifat nasional. Sebagai suatu proses, integrasi nasional menekankan pada persatuan persepsi dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Coleman J S dan Rosenberg, Carl G (1964) dan Olawore and Adisa (2008) dikutip dalam tulisan Tersoo, Ikyase J and Ejue, Egberi A. (2014: 33), mengemukakan (mendefined) bahwa integrasi nasional adalah:

*... as a broad subsuming process whose two dimentions are political integration and territorial integration while political integration has to do with progressive bridging of the elite mass gap on the vertical plane, while territorial integration refers to the progressive reduction of cultural and regional tension in the process of creating a homogeneous territorial political community. In the same vein Olawore & Adisa (2008) defined national integration as the attempt at uniting or bringing together the hitherto multi-ethnic groups of people with diverse cultural, historical, language, religions and beliefs systems into one which would remove primordial and subordinate loyalties and sentiments to ethnic nationalities.*

Mengacu pada pendapat ahli di atas, bahwa integrasi nasional termasuk integrasi politik dan teritorial secara homogen, dalam perbedaan baik kultur maupun kepercayaan dan agama ke dalam satu identitas bangsa. Untuk itu, di dalam setiap kehidupan masyarakat, kita akan menemukan integrasi dalam dua wujudnya, yaitu: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam dimensi vertikal, integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan perilaku elite dan massa, yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi kesenjangan-kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dan kelompok yang dipengaruhinya.

Sementara di dalam horizontal, integrasi nasional berkaitan dengan kadar integrasi antar kelompok-kelompok masyarakat. pada dimensi ini, proses integrasi diarahkan pada upaya untuk menjembatani perbedaan yang dilahirkan oleh faktor-faktor teritorial (termasuk kultural) dengan mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut. Dalam pengertian yang sederhana, integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah pokok. Pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan-tuntutan negara. Masalah ini mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki negara, sehingga yang dipersoalkan di sini sebenarnya adalah bagaimana hubungan antara rakyat dengan negara. Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat. Bidang masalah ini lebih banyak bersifat pembinaan kesepakatan antara sesama warga negara berkenaan dengan perilaku

yang diperlakukan oleh sistem politik agar ia dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Konsensus normatif ini dengan sendirinya tumbuh dari dan berkembang di atas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa itu secara keseluruhan.

Secara vertikal, faktor-faktor yang dapat menghambat proses integrasi terselip di dalam perbedaan-perbedaan yang ada pada kelompok elite dan massa. Perbedaan-perbedaan ini dapat berupa perbedaan latar belakang pendidikan, kehidupan ekonomi, ataupun politik. Dalam masyarakat sering kita temukan perbedaan yang sangat menyolok antara elite dan massa dalam tiga bidang tersebut. Dalam bidang pendidikan, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kelompok elite dan massa, yang meliputi jenjang, jenis dan mutu pendidikan. Begitu juga, dalam gaya kehidupan masyarakat. pada masa sekarang, ada kecenderungan elite politik untuk hidup gaya yang tidak sama dengan gaya hidup massa rakyat. Gaya hidup yang demikian, tentu tidak akan dapat dipertautkan dengan gaya kehidupan massa yang jauh berbeda. Ke dalam perbedaan ini masih dapat ditumbuhkan kesenjangan-kesenjangan lain, seperti antara desa dengan kota, industri besar dan industri kecil, dan lain-lain. Dalam bidang politik, ada pula kesenjangan ideologi antara kelompok elite dengan massa. Kesenjangan ini dapat dimunculkan oleh adanya perbedaan ideologi formal, seperti ideologi negara atau partai, selain karena adanya ideologi dalam pengertian yang tidak formal. Sementara wujud ideologi formal selalu jelas dalam masyarakat, manifestasi ideologi yang tidak formal itu antara lain bersumber pada perbedaan latar belakang kehidupan antara kelompok

elite dengan massa. Hal ini umpamanya terdapat dalam ideologi yang dimiliki oleh kelompok atas, menengah dan bawah dari masyarakat itu sendiri. Perbedaan-perbedaan yang demikian memberi dampak terhadap pemilihan ideologi formal beserta interpretasinya, dan persepsi terhadap kebijaksanaan negara dan kebijakan lainnya.

Dari sudut horizontal, di antara faktor-faktor yang menghambat proses integrasi adalah nilai-nilai primordial yang sering begitu menonjol dalam masyarakat yang majemuk. Faktor primordial itu adalah daerah kelahiran, suku, ikatan darah, ras, agama, dan bahasa. Adanya berbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki faktor atau kombinasi faktor-faktor yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan atau bahkan pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi bahwa pertentangan-pertentangan itu atau konflik itu tajam sifatnya. Ikatan-ikatan primordial tidak hanya berpengaruh dalam satu aspek kehidupan saja. Kenyataan yang sering kita jumpai di mana pun ialah bahwa primordialisme itu justru menjadi penting karena ia bergerak dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat yang majemuk akan dengan mudah dapat mengkaitkan aspek-aspek kehidupannya dengan ikatan-ikatan primordial. Kebijakan-kebijaksanaan dalam bidang ekonomi, misalnya, bisa menjadi lain bila dilihat dengan kacamata primordialisme.

Begitu pula halnya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam bidang sosial dan budaya. Bila dikaitkan dengan ikatan-ikatan primordial, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam bidang apa pun

cenderung menimbulkan kerukunan atau kesenjangan dalam masyarakat, baik pada dimensi vertikal maupun horizontal. Sebab, primordialisme senantiasa menyalurkan kepuasan dan kekecewaan ke dalam masyarakat melalui kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Keadaan inilah yang menentukan apakah masyarakat dapat menciptakan solidaritas atau tidak terhadap sesamanya. Kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan suatu kelompok primordial, tentu saja akan memuaskan kelompok tersebut, dan mengecewakan kelompok lain. Oleh karena, kepuasan yang diberikan atas kebijaksanaan pemerintah, maka kelompok pertama itu akan memberikan solidaritas dan loyalitas kepada pemerintah. Sementara kelompok yang kedua bersikap sebaliknya. Selanjutnya situasi ini menimbulkan atau mempertajam kesenjangan di antara ke dua kelompok tersebut. Hal itulah yang diperkirakan merupakan gejala-gejala awal disintegrasi dalam masyarakat. Dengan demikian, terlihatlah bahwa salah satu sumber utama dari kesenjangan dalam masyarakat adalah adanya persepsi dan sikap-sikap yang didasarkan pada ikatan primordial. Dengan kata lain, yang menjadi masalah bagi kita sebenarnya bukanlah kenyataan adanya faktor-faktor tersebut. Persepsi yang demikian menimbulkan kecurigaan ataupun rasa permusuhan dalam masyarakat, karena melalui persepsi itu kelompok-kelompok di dalam masyarakat melihat adanya keadaan yang menghambat tujuan-tujuan mereka sendiri. Kebijakan pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra tersebut diperlukan penyelesaian yang bijak dalam pengambilan keputusan, oleh karena kebijakan yang baik

adalah kebijakan mayoritas masyarakat menyetujui walaupun ada sangat sebagian kecil masyarakat tidak dapat dipuaskan dengan persepsi dan pandangan yang berbeda yang disebutkan diatas. Dengan demikian, integrasi nasional sangat dibutuhkan dan sangat berperan dalam negara yang bervariasi latar belakang yang dimiliki masyarakat yang diayomi untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar kelompok masyarakat yang mendiami negara Indonesia, oleh karena itu diperlukan ideologi sebagai perekat bangsa dalam integrasi nasional tersebut.

#### **PERANAN IDEOLOGI PANCASILA DIDALAM INTEGRASI NASIONAL**

Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia disebabkan memiliki nilai-nilai sebagai pegangan berbangsa dan bernegara. Pancasila, sebagai ideologi, dijadikan sebagai pegangan untuk mencapai suatu tujuan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ketetapan bagi warga negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang tersirat dalam sila-sila dan, selanjutnya, gagasan dasar dari sila-sila dalam Pancasila terwujud dan terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku dan pandangan serta pribadi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas, yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin dalam segi kehidupan. Berbicara tentang Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita.

Relevansi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia

terletak pada kualitas nyata yang terkandung dalam diri masyarakat itu sendiri dalam mengaktualisasikan sila-sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, relevansi mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari juga terletak pada posisi komperatif ideologi tersebut terhadap ideologi-ideologi lain seperti neoliberalisasi sehingga bangsa kita yang meyakini ideologi Pancasila dapat memahami dan menghayati betul, mengapa Pancasila sebagai ideologi yang terbaik untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus upaya membangun diri masyarakat itu sendiri dalam berbagai bidang kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kehidupan politik pada pengambilan kebijakan politik dan pemerintahan. Atas dasar itu, apabila kita membahas Pancasila sebagai ideologi tidak dapat dilepaskan dari pandangan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka sesuai dengan tuntutan zaman. Karena sejarah menunjukkan bahwa betapa kokohnya suatu ideologi bila tidak memiliki fleksibilitas atau keterbukaan maka akan mengalami kesulitan bahkan mungkin kehancuran dalam menanggapi tuntutan zaman. Contoh kasus yang dapat diambil pelajaran adalah ideologi komunis. Sebagaimana kita tahu, setelah hampir 70 tahun ideologi komunis ditinggalkan oleh pengikutnya di eropa timur di bawah naungan di negara asalnya yaitu Uni Soviet.

Menurut Alfian (1990), sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dan adanya dinamika internal. Dinamika internal itu membawa peluang pada masyarakat yang menganutnya

untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan kenyataan dari masa ke masa. Hal demikian itu akan membuat ideologi tersebut selalu aktual. Ideologi terbuka membutuhkan adanya dialog yang terus menerus tentang nilai-nilai ideal yang terkandung di dalamnya dengan realita yang ada dalam masyarakat.

Sementara itu, Soeprapto (1993/1994) mengatakan bahwa keterbukaan ideologi bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita dalam tahun 1945. Akan tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Pancasila sebagai ideologi terbuka, di satu pihak kita diharuskan mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi. Di lain pihak, didorong untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman. Selanjutnya, Ilmu pengetahuan menjelaskan fungsi dan peranan ideologi sebagai pemersatu bangsa serta pemberi arah, tujuan, dan cara mencapai kehidupan bangsa yang dicita-citakan. Ideologi juga berperan membentuk serta memberikan identitas kelompok atau bangsa, sehingga membedakannya dengan bangsa lain. Dalam artian demikian, ideologi berperan mempersatukan suatu bangsa, yang berarti berperan mewujudkan integrasi nasional suatu bangsa. Akan pentingnya peranan suatu ideologi adalah wajar, bahkan suatu kebutuhan. Hal ini dikarenakan, ideologi itu dapat timbul dengan wajar dan dimiliki oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Oetoyo Oesman (1993/1994), ideologi senantiasa berperan dalam

integrasi nasional, maka perlu dikaji bagaimana upaya yang harus dilaksanakan agar ideologi senantiasa dapat berperan sebagai faktor integratif. Oleh karena itu, perlu memiliki tiga dimensi, yaitu: dimensi idealis, realis dan fleksibilitas. Pertama-tama dapat dibedakan antara ideologi yang memiliki kerangka yang ideal dan menjunjung nilai-nilai moral, etik yang luhur dalam substansi maupun implementasinya, dengan ideologi yang tidak memilikinya.

*Kedua*, ideologi yang baik tersebut perlu memiliki dimensi fleksibilitas untuk menyongsong kebutuhan bangsa dan perkembangan dunia. Seperti diketahui, ideologi berkembang dari pandangan hidup suatu bangsa, sehingga lebih jelas perumusannya. Namun, ideologi dapat memiliki beberapa sisi negatif, antara lain: ideologi cenderung melebih-lebihkan sudut pandangnya, bahkan tidak jarang menjadi doktriner, dalam arti cenderung memonopoli seluruh kebenaran, atau sering memberikan ruang gerak bagi pengembangan pemikiran terhadapnya. Keadaan demikian, akan dapat menjelma menjadi sumber timbulnya faktor disintegrasi, manakala tidak ada lagi ruang gerak bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat akan merasa terkungkung. Keadaan demikian, merupakan suatu kondisi yang bukan saja tidak sesuai dengan laju perkembangan zaman. Oleh karena itu, bagaimanapun dipertahankan maka pada saatnya akan meledak dan mengakibatkan terjadinya perpecahan bangsa dan disintegrasi nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya suatu upaya yang perlu senantiasa dilaksanakan seiring

dengan gerak perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dinamis, sehingga ideologi Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata tidak sekedar wacana belaka. Dengan terbentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), maka menjadi tugas lembaga ini untuk lebih "membumikan" ideologi Pancasila ke seluruh kelompok-kelompok masyarakatnya yang berbhineka tunggal ika, sehingga masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Meuroke serta dari Miangas sampai Pulau Rote merasa memiliki adanya ideologi Pancasila tersebut. UKP-PIP tentunya tidak bisa bekerja sendirian harus memberdayakan kalangan cerdas pandai dari berbagai kampus di tanah air serta berbagai kalangan yang merasa "concern" dengan perkembangan ideologi Pancasila yang mengalami pasang naik dan turun seirama pergantian rezim pemerintahan yang berkuasa. Oleh karena itu, dengan kehadiran peran-serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional tersebut berlandaskan ideologi Pancasila, dengan demikian, peranan ideologi Pancasila dalam integrasi nasional sangat mempunyai peranan penting dalam mewujudkan dan menjaga kesetaraan dan keselarasan antar-masyarakat dalam negara.

## SIMPULAN

Penerapan Pancasila sebagai ideologi yang mempunyai sila-sila dalam Pancasila mempunyai peranan dalam integrasi nasional disebabkan bermacam puak dan kelompok masyarakat di berbagai wilayah tanah air sudah saatnya diaktualisasikan

dalam kehidupan keseharian dan harus disosialisasikan secara terus menerus. Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final, hanya yang perlu terus dikritisi adalah dalam rangka pengimplementasian di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa menghadapi pengaruh neo-liberalisasi di era globalisasi sekarang, tentu ada dinamika politik. Implementasi Pancasila dapat dikritisi terus menerus oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, sehingga makna Pancasila tertanam dalam hati dan didalam kehidupan masyarakat keseharian dalam menghadapi tantangan era neo-liberalisasi dan era globalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya suatu upaya yang perlu senantiasa dilaksanakan seirama dengan gerak perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dinamis, sehingga ideologi Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik kehidupan keseharian. Dengan terbentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), maka menjadi tugas lembaga inilah yang secara formal untuk mendorong lebih "membumikan" ideologi Pancasila ke seluruh kelompok masyarakat di Indonesia yang berbhineka-tunggal-ika, sehingga masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Meuroke serta dari Miangas sampai Pulau Rote merasa memiliki adanya ideologi Pancasila tersebut. UKP-PIP tentunya tidak bisa bekerja sendirian harus memberdayakan kalangan cerdas pandai dari berbagai kampus di tanah air serta berbagai kalangan yang merasa "concern" dengan perkembangan ideologi Pancasila sebagai perekat integrasi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, (1983), *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia
- Alfian dan Oetojo Oesman (Ed), (1990), *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik*, Jakarta, BP-7 Pusat;
- Coleman, J. S. & Rosenberg, Carl. G. (eds.) (1964). *Political Parties and National Integration in Tropical Africa*, Berkley and Los Angeles, University of California Press.
- Cole, Nicki Lisa Ph.D, (2017), The Definition of Ideology and the Theories Behind It, <https://www.thoughtco.com/ideology-definition-3026356>;
- Sparknotes, (2017), *Political Ideologies and Styles: What is an Ideology?*, www.sparknotes.com, <http://www.sparknotes.com/us-government-and-politics/political-science/political-ideologies-and-styles/section1.rhtml>) © 2017 SparkNotes LLC, All Rights Reserved
- Nazaruddin Sjamsuddin, (1989), *Integrasi Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia
- Nazaruddin Sjamsuddin, (1991), *Dimensi-Dimensi Vertikal dan Horizontal Dalam Integrasi Politik*, Jakarta, Jurnal Ilmu Politik No.8;
- Martin, John Levi, (2015), *What is Ideology?* Sociologia, Problemas e Practicas, no.77, University of Chicago, Illinois, USA, pp 9-31
- Oetojo Oesman, 1993/1994, *Peranan Ideologi Dalam Integrasi Nasional*, Jakarta, Mimbar BP-7 No.62
- Soeprapto, 1993/1994, *Pancasila Dalam Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Mimbar BP-7 No.62;
- Tersoo, Ikyase J and Ejue, Egberi A. (2014), Democracy and National Integration: Appraising the Challenges of Nigeria form 2003 to 2011, IOSR Journal of Humanities and Social Sciences, vol 19, Issue 11 ver II, November, pp 32-38;